LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN NOVEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 10 Desember 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 91,86 %

b. Keuangan = 19.868.362.158 (88,64%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.300.000			13.980.000		
1	Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah	21.300.000	69,73	65,73	13.980.000	(4)	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	44.320.000			33.583.898		
1	Konsultasi PUG	44.320.000	100	75,78	33.583.898	(24,22)	November Fokus

							Pengisian Laman Evaluasi PUG Nasional
Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		31.935.000			29.741.200		
1	Pembinaan dan Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota	31.935.000	100	93,13	29.741.200	(6,87)	November fokus pengisian Laman Evaluasi PUG Nasional

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		469.800.000			438.074.800		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	469.800.000	99,68	95,22	438.074.800	(4,46)	Menyesuaikan kebutuhan Anggota Dewan. Sudah terlaksana 28 titik dari total 30 titik. 2 titik akan dilaksanakan di Desember

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		18.990.000			8.070.000		
1	Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab/Kota	18.990.000	100	42,50	8.070.000	(57,50)	Sudah terlaksana kegiatan untuk TPPO, sisanya perjadin menyesuaikan kebutuhan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		40.985.000			31.181.500		
1	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota	40.985.000	84,62	76,09	31.181.500	(8,53)	ada Kegiatan Rakor Belum dilaksanakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		13.250.000			10.500.000		
1	Fasilitasi Partisipasi Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	13.250.000	80	79,50	10.500.000	(0,50)	Rapat rutin Forum Anak dilaksanakan di bulan Desember

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	7	0	0
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1.

Upaya

1.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Seminar Perempuan Berdaya untuk PHI (PP);
2. Pemberian bantuan untuk posyandu (KIE);
3. Konsultasi ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KIE);
4. Rakor evaluasi KLA mengundang kab/kota (PHA);
5. TOT Forum Anak (PHA);
6. Rakor TPK2D di Semarang (KG);
7. Penjangkauan pelayanan puspaga di kab. Demak (KG);
8. Bimtek LPLPP di Semarang (KG);
9. Sosialisasi kegiatan tribina dan UPPKA dalam upaya penurunan angka stunting di Jawa Tengah di 2 titik (KS);
10. Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB di 1 titik (KS);
11. Layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak (UPTD);
12. Peresmian UPTD (UPTD);
13. Kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan anak akan dilaksanakan di Desember di Semarang (PA);
14. Peningkatan kapasitas PPKBD (monev kesatuan gerak PKK) di 3 kab. : jepara, temanggung, surakarta(KB);
15. FGD Strategi Meningkatkan Kualitas Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan di Kota Semarang dan Surakarta (Dalduk);
16. Konsultasi dan koordinasi ke BKKBN Pusat (Dalduk)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila 聽 target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan November 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Selasa, 10 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001